

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Identifikasi Masalah

Sumber daya manusia mempunyai peranan fundamental dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Masyarakat yang produktif berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, karena dengan peningkatan produktivitas, masyarakat dapat memanfaatkan faktor ekonomi yang tersedia dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (David dan Nasri, 2015).

Pembangunan manusia ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pembangunan lebih dipusatkan kepada manusia dimana manusialah yang dijadikan tujuan akhir dan tidak sebagai alat pembangunan. Dengan kata lain manusia merupakan kekayaan negara yang sebenarnya (Sangkereng dkk, 2019). Selanjutnya pembangunan manusia adalah satu diantara parameter kemajuan negara, dimana negara tersebut dianggap maju tidak saja dalam hal pendapatan domestik bruto, namun juga dalam hal kesehatan dan pendidikan masyarakat (Widodo dkk, 2011).

Keberhasilan pembangunan manusia biasanya diukur dengan beberapa indikator. Salah satu alat ukur yang paling populer adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) (Maulana dan Bowo, 2013). Namun, dalam perkembangannya IPM mengalami perubahan metodologi semenjak beberapa tahun belakangan. Perubahan metodologi IPM terakhir terjadi pada tahun 2014.

Pembangunan manusia di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi masih terdapat permasalahan terkait dengan tingginya kesenjangan di tingkat Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020, IPM Indonesia mencapai 71,94 atau berada pada kategori tinggi, meningkat 0,02 poin dibandingkan 71,92 pada tahun 2019. Berhasilnya pembangunan manusia tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam merancang kebijakan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (David dan Nasri, 2015).

Menurut BPS (2020) IPM di Sumatera Barat mencapai peringkat 9 dari IPM nasional tertinggi pada tahun 2020. Hal ini terlihat dengan membandingkan nilai IPM kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Perbandingan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia di Sumatera Barat diperlihatkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011-2019

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Kepulauan Mentawai	55.56	55.9	56.1	56.33	56.73	57.41	58.27	59.25	60.28	61.26
Kab. Pesisir Selatan	65.09	65.8	66.49	67.31	67.75	68.07	68.39	68.74	69.4	70.08
Kab. Solok	64.53	65.28	65.62	66.15	66.44	67.12	67.67	67.86	68.6	69.08
Kab. Sijunjung	62.51	62.92	63.7	64.48	64.95	65.3	66.01	66.6	66.97	67.66
Kab. Tanah Datar	66.47	66.92	67.29	68.12	68.51	69.49	70.11	70.37	71.25	72.14
Kab. Padang Pariaman	65.16	65.89	66.2	67.15	67.56	68.04	68.44	68.9	69.71	70.59
Kab. Agam	66.12	66.94	67.95	68.73	69.32	69.84	70.36	71.1	71.7	72.37
Kab. Lima Puluh Kota	64.64	65.2	65.87	66.3	66.78	67.65	68.37	68.69	69.17	69.67
Kab. Pasaman	60.88	61.57	62.26	62.91	63.33	64.01	64.57	64.94	65.6	66.46
Kab. Solok Selatan	64.51	64.81	65.12	65.86	66.29	67.09	67.47	67.81	68.45	68.94
Kab. Dharmasraya	66.56	67.4	67.76	68.71	69.27	69.84	70.25	70.4	70.86	71.52
Kab. Pasaman Barat	61.77	62.55	63.33	63.92	64.56	65.26	66.03	66.83	67.43	68.21
Kota Padang	78.44	78.68	79	79.23	79.83	80.36	81.06	81.58	82.25	82.68
Kota Solok	74.38	74.68	75.02	75.54	76.2	76.83	77.07	77.44	77.89	78.38
Kota Sawahlunto	67.55	67.97	68.59	69.07	69.61	69.87	70.67	71.13	71.72	72.39
Kota Padang Panjang	73.27	73.76	74.22	74.54	75.05	75.98	76.5	77.01	77.3	78
Kota Bukittinggi	76.12	76.3	76.92	77.67	78.02	78.72	79.11	79.8	80.11	80.71
Kota Payakumbuh	74.89	75.39	75.89	76.34	76.49	77.42	77.56	77.91	78.23	78.95
Kota Pariaman	72.56	73.07	73.47	74.51	74.66	74.98	75.44	75.71	76.26	76.7
Provinsi Sumatera Barat	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98	70.73	71.24	71.73	72.39

Sumber: bps.go.id

Tabel 1.1 mendeskripsikan ketidakmerataan tingkat IPM di Sumatera Barat selama periode 2010-2019. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kawasan paling barat pulau Sumatera yang memiliki IPM terendah. Rata-rata IPM berkisar

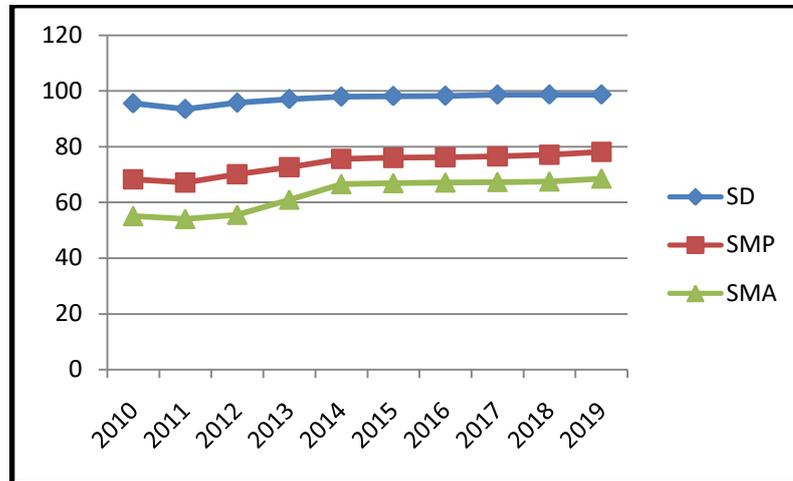
dari angka 75-80, hanya diduduki 6 kota di Sumatera Barat pada tahun 2019. Meskipun IPM secara keseluruhan mengalami kenaikan, namun permasalahannya adalah kesenjangan kinerja IPM yang cukup lebar di antara beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa, untuk menciptakan daya saing nasional berfokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas segalanya dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang memiliki kualitas. Capaian pembangunan manusia di Sumatera Barat pada periode 2019 sebesar 72,39, meningkat 0,66 poin dibandingkan periode sebelumnya (71,73). Kinerja IPM di daerah kota relatif lebih baik dibandingkan di daerah kabupaten. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang memiliki IPM masing-masing sebesar 82,68, 80,71 dan 78. Sementara wilayah kabupaten, misalnya IPM Kabupaten Pasaman sebesar 66,46, Sijunjung sebesar 67,66, dan Kepulauan Mentawai sebesar 61,26. Penyebab tingginya IPM di kota Padang karena kota Padang menjadi pusat perekonomian, pendidikan dan mudah dalam mengakses layanan kesehatan (Wahyudi, 2017).

Pencapaian pembangunan manusia suatu daerah dapat menggambarkan capaian IPM suatu daerah dari segi pendidikan, kesehatan, dan daya beli (Aini dkk, 2016). Aspek fundamental dalam pengembangan sumber daya manusia yaitu pendidikan. Bagi negara berkembang, strategi pengembangan sumber daya manusia yaitu menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama sejak dini (Todaro, 2004).

Menurut BPS (2019), strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu menjalani proses pendidikan sesuai dengan tingkat dan usia. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah parameter dengan satuan persentase yang dipergunakan untuk mendeskripsikan bagaimana anak usia sekolah mengenyam dunia pendidikan menurut umur dan tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan SMA di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010-2019 diperlihatkan pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan SMA/SMK/MA Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2011-2019



Sumber: *bps.go.id*

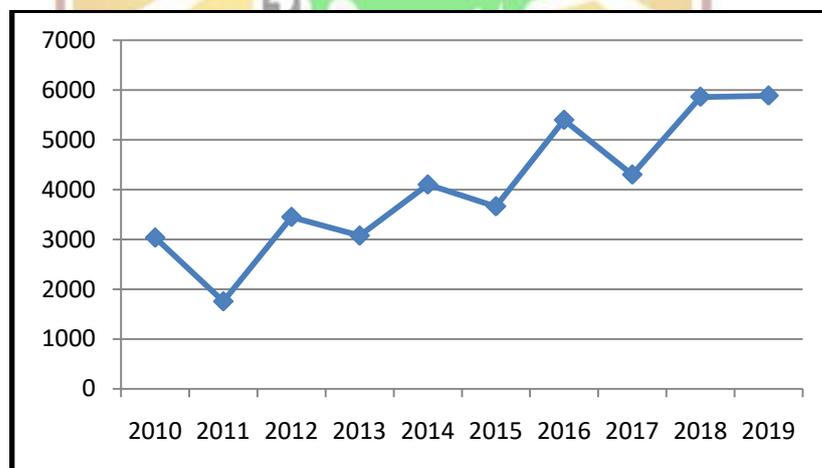
Gambar 1.1 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2011-2019, angka partisipasi murni Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat pada setiap tingkatan pendidikan, terlebih lagi pada APM SD. Seperti terlihat pada Gambar 1.1, APM SD hampir 100 %, artinya semua anak berusia 7-12 tahun (SD) nyaris dapat mengenyam pendidikan tepat waktu. Keadaan tersebut mengindikasikan terdapat kenaikan kualitas pendidikan masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Mutu sumber daya manusia yang tinggi mencerminkan capaian kesehatan dan pendidikan juga tinggi yang nantinya akan berpengaruh terhadap pembangunan manusia (Astri dkk, 2013).

Menurut Maulana dan Bowo (2018) hubungan antara pendidikan dengan kualitas hidup manusia memiliki hubungan positif. Peluang seseorang dapat diperluas melalui pendidikannya. Kreativitas dan imajinasi dapat menunjang pendidikan. Selanjutnya, pendidikan menjadi nilai tambah dalam memperlebar keinginan. Manusia memiliki pendidikan tinggi lebih memperdulikan kesehatan untuk dapat menikmati hidup. Selain memiliki pendidikan tinggi, kesempatan dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik (Syahrani, 2018). Oleh sebab itu, dalam peningkatan sumber daya manusia pendidikan merupakan hal fundamental bagi suatu bangsa (Rosyadah, 2020).

Hubungan antara pendidikan yang diukur dengan Angka Partisipasi Murni (APM) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat ditemui dalam penelitian Zuhairah (2018). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Angka Partisipasi Murni (APM) tidak memiliki hubungan secara parsial terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur. Namun, penelitian yang dilakukan Rosyadah (2020) mengungkapkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) memiliki hubungan positif dengan IPM.

Dalam proses pembentukan IPM, komponen kesehatan memegang peranan sangat besar untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia (Syahrani, 2018). Indikator kesehatan bisa diukur dari jumlah sarana kesehatan (puskesmas), dalam meningkatkan IPM pelayanan pendidikan dan kesehatan sangatlah penting (Rosyid dan Lukito, 2019). Jumlah sarana kesehatan (puskesmas) Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2019 diperlihatkan pada Gambar 1.2

Gambar 1.2 Jumlah Bidan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2010- 2019 (jiwa)



Sumber: *bps.go.id*

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, jumlah tenaga paramedis (bidan) di Provinsi Sumatera Barat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Seperti terlihat pada Gambar 1.2, jumlah bidan pada tahun 2016 sebanyak 5.397 orang sedangkan pada tahun 2017 jumlah bidan mengalami penurunan sebesar 4.300 orang dan pada tahun 2018 jumlah bidan meningkat sebanyak 5.861 orang. Naik turunnya jumlah bidan di Provinsi Sumatera Barat menggambarkan ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan menurut

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat terutama daerah terpencil seperti wilayah Kepulauan Mentawai. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus menerapkan strategi distribusi tenaga paramedis yang lebih adil dan meningkatkan jumlah tenaga paramedis (bidan), sehingga tidak terjadi lagi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Barat.

Manurung (2018) telah melakukan kajian mengenai korelasi antara variabel kesehatan yang diukur dengan jumlah tenaga paramedis (bidan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasilnya menunjukkan variabel jumlah tenaga paramedis (bidan) berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap IPM di Provinsi Sumatera Selatan. Pendapat ini didukung oleh kajian yang dilaksanakan Kadri, dkk (2020) yang mendeskripsikan variabel jumlah bidan memiliki korelasi positif dengan IPM.

Indeks Pembangunan Manusia dapat mencerminkan kesejahteraan suatu masyarakat (Sangkereng dkk, 2019). Untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, dibutuhkan pemerataan pendapatan. Menurut Pratiwi dan Sutrisna (2014), PDRB perkapita merupakan satu diantara indikator kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Jika pertumbuhan PDRB per kapita tinggi, maka tingkat pendidikan akan meningkat dan terdapat lebih banyak tersedia pekerjaan yang baik. Menurut Norton (2002), IPM bisa dipengaruhi oleh PDRB per kapita. Meningkatnya PDRB per kapita mampu menaikkan standar hidup layak masyarakat yang nantinya daya beli masyarakat juga akan meningkat. Meningkatnya daya beli masyarakat maka dengan sendirinya IPM juga akan mengalami peningkatan.

Menurut Taryono (2014), terdapat hubungan yang positif antara tingkat kesejahteraan penduduk yang parameteranya adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dengan pembangunan manusia. Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera barat dengan IPM lebih tinggi terbukti mempunyai PDRB perkapita yang tinggi pula. Misalnya, PDRB perkapita Kota Padang periode 2019 atas dasar harga konstan adalah Rp. 46,78 juta, Kota Bukittinggi mencapai Rp. 47,06 juta dan Kota Padang Panjang mencapai Rp. 48,08 juta. Sementara itu, wilayah dengan PDRB perkapita rendah adalah Kabupaten Pasaman mencapai

Rp. 21,97 juta, Sijunjung mencapai Rp. 28,47 juta, Solok Selatan mencapai Rp. 23,26 juta, dan Pesisir Selatan mencapai Rp. 20,65 juta (BPS, 2019).

Penelitian tentang hubungan PDRB perkapita terhadap IPM juga telah dilakukan oleh Arniwita, dkk (2020). Hasil kajiannya mengungkapkan bahwa PDRB perkapita berpengaruh signifikan dan memiliki korelasi positif dengan IPM. Namun, pendapat ini bertolak belakang dengan kajian yang telah dilakukan Aini, dkk (2016) yang menyatakan PDRB perkapita tidak berpengaruh terhadap IPM di Kota Depok.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, kajian ini fokus pada bagaimana hubungan PDRB perkapita, jumlah tenaga paramedis (bidan) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA terhadap variasi IPM di Provinsi Sumatera Barat. Terdapat dua alasan mendasar mengapa penelitian ini harus dilakukan. Pertama, karena masih terjadi ketidakmerataan IPM di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Kedua, IPM merupakan satu diantara indikator untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah. Kajian ini menggunakan periode 2010-2019. Berdasarkan dua hal yang mendasar ini, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai variasi faktor penyebab perbedaan pencapaian IPM menurut daerah di Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah utama pada kajian ini adalah bagaimana PDRB perkapita, jumlah tenaga paramedis dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat pada periode 2010-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam kajian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh PDRB perkapita, jumlah tenaga paramedis dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat pada periode 2010-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam kajian ini adalah:

- 1) Bagi penulis, kajian ini bermanfaat untuk pengembangan dan menerapkan ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi serta digunakan untuk menambah wawasan keilmuan dan mempertajam daya pikir ilmiah.
- 2) Kajian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan kajian selanjutnya, terutama mendalami aspek-aspek yang belum dibuktikan dalam kajian ini.

